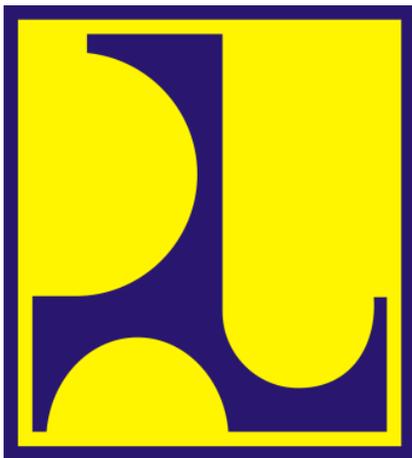


SKPD-TP Dinas PSDA

Provinsi Jawa Tengah

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2015



Jl Madukoro Blok AA-BB
Semarang 50144



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

SKPD-TP Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD-TP Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada SKPD-TP Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Semarang, Desember 2015
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Ketut Arsa Indrawatara, Sp1
NIP 19610424 199010 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	20
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	24
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	29
F. Pengungkapan Penting Lainnya	31
VI. Lampiran dan Daftar	



PEMERINTAH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD-TP Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, Desember 2015
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Ketut Arsa Indrawatara,Sp1
NIP 19610424 199010 1 002

Laporan Keuangan SKPD-TP Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.57.113.738 atau mencapai 100 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar Rp 90.637.854.269. atau mencapai 94.65 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 95.765.229.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2015 .

Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp6.236.725.188 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 199.309.700 ; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 5.426.844.496 ; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 610.570.992.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 6.236.725.188

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 56.003.738, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 90.673.180.815. sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(90.617.177.077.). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp 1.110.000 dan defisit sebesar Rp 0. sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (90.616.067.077)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp 6.798.882.884 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(90.616.067.077)Dikurangi Penyesuaian nilai tahun berjalan sebesar Rp (526.831.150) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 90.580.740.531 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp 6.236.725.188.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

KI. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SKPD-TP DINAS PSDA PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2015		% thd Angg	TA 2014
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	57.113.738	100,00	225.973.693
JUMLAH PENDAPATAN		-	57.113.738	100,00	225.973.693
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	95.765.229.000	90.637.854.269	94,65	111.573.007.492
Jumlah Belanja Operasi		95.765.229.000	90.637.854.269	94,65	111.573.007.492
JUMLAH BELANJA		95.765.229.000	90.637.854.269	94,65	111.573.007.492

II. NERACA

**SKPD-TP DINAS PSDA PROVINSI JAWA TENGAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Dalam
Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	C.1	199.309.700	435.844.200
Jumlah Aset Lancar		199.309.700	435.844.200
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.2	3.462.091.102	3.706.477.582
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.3	5.863.187.545	5.863.187.545
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.4	(3.898.434.151)	(3.737.876.443)
Jumlah Aset Tetap		5.426.844.496	5.831.788.684
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.5	531.250.000	531.250.000
Aset lain-lain	C.6	244.386.480	
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset lainnya	C.7	(165.065.488)	
Jumlah Aset Lainnya		610.570.992	531.250.000
JUMLAH ASET		6.236.725.188	6.798.882.884
EKUITAS			
Ekuitas	C.7	6.236.725.188	6.798.882.884
JUMLAH EKUITAS		6.236.725.188	6.798.882.884
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6.236.725.188	6.798.882.884

III. LAPORAN OPERASIONAL

SKPD-TP DINAS PSDA PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	56.003.738	-
JUMLAH PENDAPATAN		56.003.738	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	15.108.578.325	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	46.258.674.565	-
Beban Pemeliharaan	D.5	25.300.428.760	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	3.679.875.969	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	325.623.196	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		90.673.180.815	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(90.617.177.077)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		1.110.000	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.110.000	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(90.616.067.077)	-
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(90.616.067.077)	-

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SKPD-TP DINAS PSDA PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
EKUITAS AWAL	E.1	6.798.882.884	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(90.616.067.077)	-
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN		(526.831.150)	
Penyesuaian nilai aset	E.3	(526.831.150)	
penyesuaian nilai kewajiban	E.4		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.5	-	-
KOREKSI ASET TETAP	E.6	-	-
KOREKSI ATAS BEBAN	E.7	-	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.8	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
Jumlah Lain-Lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.9	90.580.740.531	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.10	(562.157.696)	
EKUITAS AKHIR		6.236.725.188	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis SKPD-TP Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

SKPD-TP Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang, Jawa Tengah.

SKPD-TP Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas SKPD-TP Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh SKPD-TP Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

SKPD-TP Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan SKPD-TP Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai

perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari SKPD-TP Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD-TP Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan Rp.
57.113.738

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 57.113.738 atau mencapai 100 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 0. Pendapatan SKPD-TP Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Pendapatan Denda dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2015		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan negara Bukan Pajak	-	57.113.738	100,00
Jumlah	-	57.113.738	100,00

Realisasi Pendapatan Penerimaan Pajak TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 0 % persen dibandingkan TA 2014. Hal ini disebabkan tidak adanya Penerimaan Pajak yang berhubungan dengan tugas dan fungsi SKPD-TP Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak SKPD-TP Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar (74,73 %) yang berasal dari pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah dan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Pajak	-	-	0,00
Penerimaan Negara Bukan Pajak	57.113.738	225.973.693	-74,73
Jumlah	57.113.738	225.973.693	(74,73)

Realisasi Belanja
Negara Rp Rp.
90.637.854.269

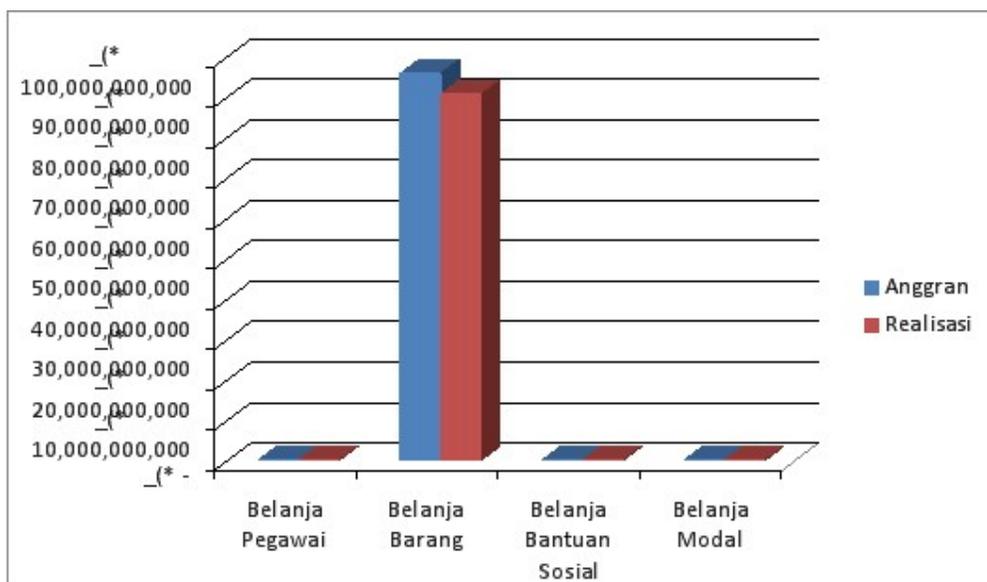
B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2015 adalah sebesar Rp 90.637.854.269 atau 94.65% dari anggaran belanja sebesar Rp 95.765.229.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2015

URAIAN	2015		
	ANGGARAN	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	95.765.229.000	90.637.854.269	94,65
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	95.765.229.000	90.637.854.269	94,65

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2014, Realisasi Belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 123.10% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pengadaan belanja barang untuk mendukung rencana strategis yang dimulai pada TA 2015 dilakukan tepat waktu
2. Tugas pembantuan dari belanja barang untuk Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan telah Dilaksanakan

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI TA 2015	REALISASI TA 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	90.637.854.269	111.573.007.492	123,10
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	90.637.854.269	111.573.007.492	123,10

Belanja Pegawai Rp
0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Realisasi belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dari TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Tidak adanya pegawai yang dibiayai dari belanja pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI TA 2015	REALISASI TA 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	0	0	-
Belanja Vakasi	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	-
Jumlah Belanja	0	0	-

Belanja Barang
Rp90.637.854.269

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 90.637.854.269 dan Rp 111.276.991.223. Realisasi Belanja Barang TA 2015 mengalami kenaikan 123,10% dari Realisasi Belanja Barang TA 2014. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja barang operasional yang cukup signifikan disamping menurunnya biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas sepanjang tahun 2015.

Perbandingan Belanja Barang TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI TA 2015	REALISASI TA 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	616.880.000	647.440.000	104,95
Belanja Barang Non Operasional	61.408.833.940	80.650.482.819	131,33
Belanja Jasa	848.767.000	970.780.000	114,38
Belanja Pemeliharaan	24.089.425.000	25.649.149.000	106,47
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.679.875.969	3.659.045.698	99,43
Jumlah Belanja Kotor	90.643.781.909	111.576.897.517	123,09
Pengembalian Belanja	5.927.640	3.890.025	
Jumlah Belanja	90.643.781.909	111.580.787.542	123,09

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TH 2015	TH 2014
Bank BNI	-	-
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan
Rp199.309.700

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp 199.309.700 dan Rp 435.844.200.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TH 2015	TH 2014
Barang Konsumsi	45.534.900	108.390.100
Barang untuk Pemeliharaan	-	19.598.000
Suku Cadang	208.000	2.480.000
Bahan baku	153.566.800	300.408.100
Persediaan Lainnya	-	4.968.000
Jumlah	199.309.700	435.844.200

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Peralatan dan Mesin
Rp3.462.091.102

C.3 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp3.462.091.102 dan Rp3.706.477.582. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014	3.706.477.582
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2015	3.462.091.102
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	(3.275.945.848)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	186.145.254

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp.
5.863.187.545

C.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.863.187.545 dan Rp 5.863.187.545. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014	5.863.187.545
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2015	5.863.187.545
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	(622.488.303)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	5.240.699.242

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(3.898.434.151)

C.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing Rp(3.898.434.151) dan Rp(3.737.876.443). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.462.091.102	3.275.945.848	186.145.254
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.863.187.545	622.488.303	5.240.699.242
Akumulasi Penyusutan		9.325.278.647	3.898.434.151	5.426.844.496

Aset Tak Berwujud
Rp531.250.000

C.6 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp531.250.000 dan Rp531.250.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada SKPD-TP Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah berupa Hasil Kajian/Penelitian detail design . Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014	531.250.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2015	531.250.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	-
Nilai Buku per 31 Desember 2015	531.250.000

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Hasil Kajian/Penelitian detail design	531.250.000
Jumlah	531.250.000

Aset Lain-lain
Rp244.386.480

C.7 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp244.386.480 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah ada di kelompok akun Aset Lainnya.

Ekuitas
Rp6.236.725.188

C.8 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.236.725.188 dan Rp6.798.882.884. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp 56.003.738

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp56.003.738 dan Rp 0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2015 dan 2014

URAIAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Denda	56.003.738	-	100%
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	56.003.738	-	100%

Beban Pegawai
Rp 0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	0	-	-
Beban Tunjangan-Tunjangan	0	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	0	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	0	-	-

Beban Persediaan
Rp 15.108.578.325

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 15.108.578.325 dan Rp 0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.596.431.450	-	100%
Beban Persediaan Bahan baku	13.113.008.375	-	100%
Beban Persediaan Lainnya	399.138.500	-	100%
Jumlah Beban Persediaan	15.108.578.325	-	100%

Beban Barang dan
Jasa Rp
46.258.674.565

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.46.258.674.565 dan Rp0. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa Tahun 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
beban Keperluan Perkantoran	238.000.000	-	100,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	378.880.000	-	100,00
Beban Bahan	452.545.275	-	100,00
Beban Honor Output Kegiatan	1.726.865.275	-	100,00
Beban barang Non Operasional Lainnya	42.613.617.290	-	100,00
Beban Sewa	848.767.000	-	100,00
Jumlah	46.258.674.840	-	100,00

Beban
Pemeliharaan
Rp.25.300.428.760

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp25.300.428.760 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Irigasi	24.089.425.000	-	100,00
Beban persediaan untuk pemeliharaan	794.074.400		100,00
Beban Persediaan Suku Cadang	422.857.000		100,00
Pengembalian Beban Pemeliharaan Irigasi	(5.927.640)		100,00
Jumlah	25.300.428.760	-	100,00

Beban Perjalanan
Dinas
Rp.3.679.875.969

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.3.679.875.969 dan Rp0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	243.440.000	-	100%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.436.435.969	-	100%
Jumlah	3.679.875.969	-	100%

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	-
Jumlah	0	-	-

Beban Bantuan Sosial Rp 0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	-	-
Jumlah	0	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 325.623.196

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp325.623.196 dan Rp 0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 dan 2014

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	202.917.380	-	100%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	117.263.748	-	100%
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi pemerintah	5.442.068	-	100%
Jumlah Penyusutan	325.623.196	-	100%
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	325.623.196	-	100%

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	0	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	0	-	-
Jumlah	0	-	-

Beban Lain-lain
Rp 0

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain Tahun 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Aset Extrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	-	-
Beban Aset Extrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	-	-
Beban Aset Extrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	-	-
Jumlah	0	-	-

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.1.110.000

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2015 dan 2014

URAIAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Penerimaan Kembali belanja barang TAYL	1.110.000	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Penerimaan Kembali belanja barang TAYL	0	-	-
Defisit Selisih Kurs	0	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	1.110.000	-	-

Pos Luar Biasa
Rp.0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2015 dan 2014

URAIAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	-	-
Beban Perjalanan Dinas	0	-	-
Beban Persediaan	0	-	-
Jumlah	0	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.6.798.882.
884

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.6.798.882.884 dan Rp0.

Defisit LO
Rp(90.616.067.077)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp(90.616.067.077) dan Rp0. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

Koreksi Aset Tetap
Rp.0

E.4 Koreksi Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Koreksi Atas Beban
Rp(0)

E.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp(0) dan Rp0. Rincian untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Beban

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Beban Pegawai	-
Beban Jasa	-
Jumlah	-

Koreksi Atas
Pendapatan Rp.0

E.6 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Pendapatan

Jenis Pendapatan	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	-
Pendapatan Lainnya	-
Jumlah	-

Ekuitas Akhir
Rp6.236.725.188

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp6.236.725.188 dan Rp.0

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Terdapat Pengembalian Belanja Sebesar Rp. 25.295.000 yang tidak diketahui sumber dokumennya

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Terdapat Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp. 1.110.000,-

Lampiran A1

SKPD-TP Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi,
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2015

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akumulasi	Nilai Buku
		Manfaat		Penyusutan	
A	Peralatan dan Mesin		3.462.091.102	3.275.945.848	186.145.254
1	Alat Angkutan Darat Bermotor				
	- Kendaraan roda dua	7	140.140.000	140.140.000	-
	- Kendaraan roda empat	7	884.033.600	839.005.030	45.028.570
2	Alat Bengkel/Alat Ukur				
	- Calibration generation	5	11.862.400	11.862.400	-
	- Universal tester	5	4.100.000	4.100.000	-
	- Rain gauge	5	7.000.000	7.000.000	-
	- Sunshine recorder	5	22.000.000	22.000.000	-
	- Actiongraph	5	25.000.000	25.000.000	-
	- Barograph	5	20.000.000	20.000.000	-
	- Anemometer	5	35.000.000	35.000.000	-
	- Alat pengukur curah hujan	5	168.536.000	168.536.000	-
3	Alat Kantor/Rumah Tangga				
	- Alat kantor	5	95.303.447	94.544.447	759.000
	- Alat rumah tangga	5	150.170.003	150.170.003	-
4	Alat Studio/Komunikasi/ Peralatan Pemancar				
	- Alat studio	5	264.986.486	264.986.486	-
	- Alat komunikasi	5	173.434.200	173.434.200	-
	- Alat komunikasi Navigasi	5	11.200.000	4.106.680	7.093.320
5	Alat Kedokteran				
	- Alat kedokteran	5	7.200.000	7.200.000	-
6	Alat Laboratorium				
	- Unit alat laboratorium	8	456.025.976	384.369.161	71.656.815
	- Alat proteksi lingkungan	10	93.350.000	60.677.500	32.672.500
	- Radiation application	10	56.150.000	36.497.500	19.652.500
	- Alat lab. Standar Kalibrasi	10	17.400.000	10.230.000	7.170.000
7	Komputer Unit/Peralatan Komputer				
	- Komputer unit	4	525.819.992	523.852.918	1.967.074
	- Peralatan komputer	4	293.378.998	293.233.523	145.475
B	Jalan,Irigasi,Dan Jaringan		5.863.187.545	622.488.303	5.240.699.242
	- Jalan,Irigasi dan Jaringan	-	5.863.187.545	622.488.303	5.240.699.242
Jumlah Akm Penyusutan Aset Tetap			9.325.278.647	3.898.434.151	5.426.844.496
Jumlah Akm Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya			30		